

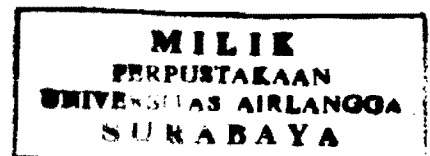
# SKRIPSI

**ABDUL GHOFAR**

**EKSISTENSI PASAL 50 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NO. 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA  
NOMOR: 004/PUU-I/2003)**



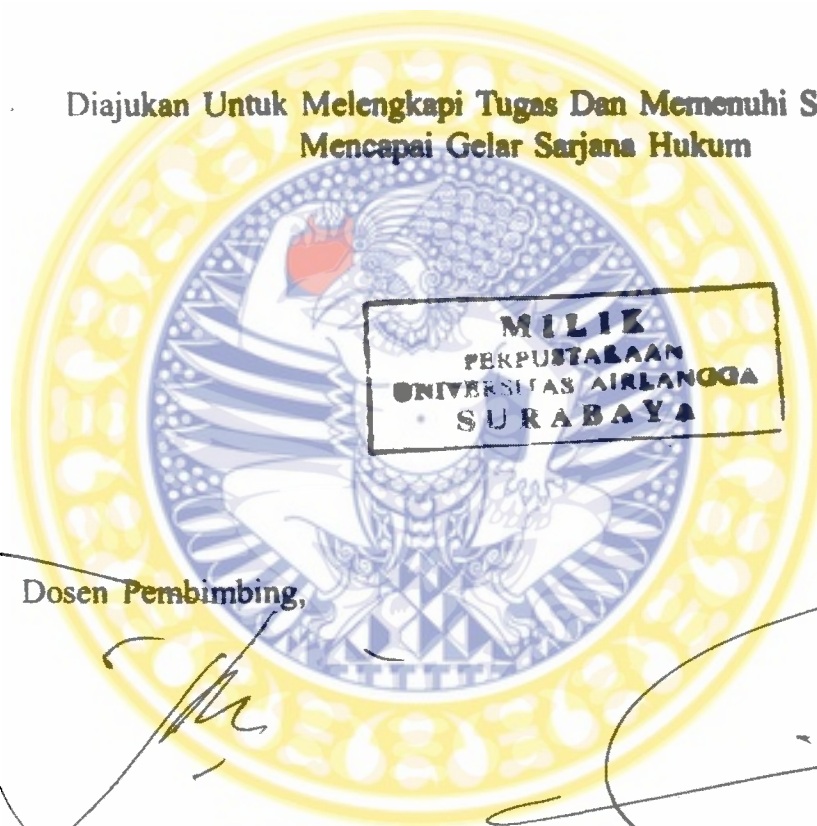
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**EKSISTENSI PASAL 50 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NO. 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA  
NOMOR: 004/PUU-I /2003)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**Dosen Pembimbing,**

**SUKARDI, S.H., M.H.**  
NIP. 131 855 885

**Penyusun,**

**ABDUL GHOFFAR**  
NIM. 030 015 104

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Alasan utama yang menjadikan dasar kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang No. 14 tahun 1985 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Macri Hendra adalah terletak pada dua permasalahan, yaitu; *pertama*, apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 yang pertama ? *Kedua*, Apakah pemohon mempunyai *legal standing* ?

Terhadap permasalahan tersebut, enam Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan memutus perkara permohonan pengujian UU yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 yang pertama, dan pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing*. Sementara itu, ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi yang lain menyatakan sebaliknya.

Setelah diadakan analisis maka menurut penulis, pendapat keenam Hakim Konstitusi adalah pendapat yang paling tepat untuk kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan, kalau kita cermati pendapat dari ketiga Hakim Konstitusi yang menolak perkara tersebut terlalu *rigid* menerapkan aturan-aturan dan asas-asas



hukum tanpa melihat unsur keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

Jika perkara tersebut tidak diterima, tentu pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh Undang-Undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 yang pertama akan kesulitan mencari jalan keluarnya. Andaikan menggunakan jalan keluar yang disarankan oleh Hakim Konstitusi Roestandi yaitu dengan jalan *legislative review*, tentu sulit dilakukan oleh pemohon. Hal ini dikarenakan *legislative review* dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah. Perlu dimengerti bahwa kedua lembaga ini adalah lembaga politik yang itu artinya hanya orang-orang yang mempunyai *power* politik yang bisa melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan pemohon—apalagi masyarakat biasa—yang tidak mempunyai kekuatan politik apa-apa.

Kalau pendapatnya Roestandi dipaksakan untuk digunakan, bisa jadi sejarah ketatanegaraan kita akan kembali ke masa lampau ketika UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman masih berlaku. Di dalam Pasal 26 (1) dikatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Ayat (2) mengatakan; “Putusan

tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi...”

Undang-undang tersebut memberi peluang untuk dilakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan jalan kasasi. Sekedar informasi, suatu perkara untuk sampai pada pemeriksaan kasasi, perkara tersebut harus telah diproses di Pengadilan Tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua (*banding*). Padahal kedua pengadilan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk memproses persoalan “Hak menguji” peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu artinya bahwa pengujian tersebut tidak mungkin bisa dilakukan. Ibaratnya pengujian tersebut diberikan dengan tangan kiri dan ditarik kembali dengan tangan kanan.

Menurut penulis, hal serupa juga akan terjadi apabila proses pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 yang pertama dilakukan melalu jalur *legislative review*. Mengingat yang bisa melakukan hal ini adalah mereka yang mempunyai kekuatan politik besar. Untuk itu, lebih baik pengujian tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui “Hak Menguji” sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945

setelah amandemen dengan mengenyampingkan Pasal 50 UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Jika pengujian tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka semua perorangan warganegara Indonesia, Masyarakat hukum adat yang masih hidup, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara akan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencari keadilan.

“Hak Menguji” undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen UUD 1945 yang pertama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak menghapus kewenangan dari pembuat undang-undang untuk melakukan *Legislative Review*. Dari sini berarti Masyarakat pencari keadilan mempunyai dua kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang didambakannya.

Berbicara mengenai *legal Standing* pemohon, penulis beranggapan bahwa pemohon dalam hal ini Machri Hendra mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 14 tahun 1985 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.

Kalau kita cermati dari argumentasi hukum yang dikeluarkan oleh para hakim Konstitusi tersebut, maka yang menjadi dasar utama perbedaan pendapat diantara mereka mengenai apakah pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak adalah terletak pada apakah telah terpenuhi dua unsur syarat sahnya *legal standing* yaitu; unsur adanya hak dan kewenangan konstitusional dan unsur



“dirugikan”. Sebagaimana diketahui bahwa didalam pasal 51 (1) UU No. 24 tahun 2003 dikatakan bahwa;

“pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga negara indonesia, b...”

Dalam pasal tersebut ada dua unsur titik tekan yaitu “unsur hak dan kewenangan konstitusional” dan “unsur dirugikan”. Pengertian “Hak dan kewenangan konstitusional” dijelaskan di dalam penjelasan pasal 51 (1) UU No. 24 tahun 2003 yang berbunyi; “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Menurut pemohon, hak konstitusionalnya yang terdapat di dalam UUD 1945 yaitu pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) serta 28 I ayat (2) telah dilanggar dengan adanya ketentuan yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) huruf g UUD No. 14 tahun 1985. Pendapat pemohon tersebut tidak bisa diterima oleh Hakim Konstitusi Roestandi dan Natabaya. Sementara keenam hakim konstitusi yang menerima perkara tersebut mengatakan hak dan kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan.

Menurut penulis, pemohon mempunyai hak dan kewenangan konstitusional yang terdapat di dalam pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) serta 28 I

ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen. Sehingga “unsur pertama” telah dipenuhi oleh pemohon.

Selanjutnya unsur kedua yang harus dipenuhi pemohon adalah dirugikan. Di dalam konsep teori yang telah dipaparkan diatas, kerugian tersebut harus faktual atau nyata-nyata telah dirugikan dan bukan potensial dirugikan. Dalam kasus **Machri Hendra**, meskipun dia belum mencalonkan diri sebagai Calon Hakim Agung, akan tetapi dengan adanya pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 14 tahun 1985 secara hukum tertutuplah kemungkinan pemohon mengajukan pencalonan sebagai Hakim Agung. Itu artinya kerugian tersebut sudah faktual. Kalau kita tarik dalam sebuah kasus lain (baca; contoh), apakah seseorang yang mendapat ancaman dibunuh oleh seseorang kemudian melaporkan kepada polisi, kemudian polisi tidak mau menangani kasus tersebut dengan alasan belum ada kerugian faktual yaitu pelapor belum nyata-nyata dibunuh oleh pengancam tersebut. Tentu bukan itu yang dimaksud oleh unsur dirugikan yang terdapat di dalam pasal 51 (1) UU No. 24 tahun 2003 tersebut. Untuk itu, penulis beranggapan bahwa pemohon telah memenuhi unsur dirugikan.

Dari sini jelas sekali bahwa dengan terpenuhinya kedua syarat sahnya *legal standing* sebagaimana yang diatur didalam pasal 51 (1) UU No. 24 tahun 2003 maka secara sah dan menyakinkan pemohon Machri Hendra mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pengujian UU No. 14 tahun 1985 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi RI.



- b. Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 *in casu* dalam kasus pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dianggap tidak ada atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 004/PUU/2003 tentang permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Machri Hendra, Hakim Pengadilan Negeri Padang.

Meskipun begitu mengingat pengenyampingan pasal tersebut dilakukan di dalam konsideran putusan dan bukan pada amar putusan maka eksistensi pasal tersebut sekarang masih ada dan masih berlaku. Artinya, jika suatu saat ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi dimana undang-undang tersebut diundangkan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, maka Hakim Konstitusi akan melakukan *ijtihad* lagi (berdebat ulang dengan pendapatnya masing-masing) dan tidak langsung berpegangan pada putusan yang telah dibuat ketika dalam kasus pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Hal ini berarti putusan tersebut tidak menjadi jurisprudensi dengan alasan pengenyampingan pasal 50 tersebut tidak ditaruh dalam amar putusan (penetapan vonis) tetapi disisipkan dalam konsideran atau pertimbangan hukum putusan.

## 2. Saran-saran

- a. Langka Mahkamah Konstitusi yang menerima perkara pengujian pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut merupakan langka monumental yang patut dihargai, namun langka tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan “Hak Menguji” atas pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini dikarenakan, putusan MK No. 004/PUU/2003 tidak bisa menjadi jurisprudensi yang itu berarti dimungkinkan suatu saat dalam suatu pengujian Undang-Undang yang diundangkan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, MK menolak perkara tersebut dengan mendasarkan pada pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2003. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi harus segera melakukan pencabutan terhadap pasal tersebut.

Ada beberapa jalan alternatif yang bisa ditempuh oleh Mahkamah konstitusi, yaitu :

*Pertama*, secara etis yuridis memang tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan “Hak Menguji” kepada dirinya sendiri. Dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi hal itu tidak diatur. Oleh karena itu, sebaiknya yang mengajukan permohonan “Hak Menguji” kepada Mahkamah Konstitusi adalah pihak lain yang dirugikan, dalam hal ini adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, maupun lembaga negara yang lain biasa

mengajukan permohonan “Hak Menguji” kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi ini.

*Kedua*, penulis menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengajukan “Hak Menguji” kepada dirinya sendiri, atau dengan kata lain melakukan “Hak Menguji” secara aktif tanpa menunggu adanya permohonan dari pihak lain. Bila dilihat dari perumusan pasal 24C ayat (1). Disana dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Disana tidak disebutkan secara jelas tentang bagaimana mekanisme pengujian tersebut, serta tidak ada perintah untuk mengaturnya dalam undang-undang. Dengan mengingat *stufen theorie* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, ini berarti tidak boleh menambah, mengurangi atau meristik Konstitusi, berarti bisa diinterpretasikan bahwa mekanisme pengujian tersebut masih bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pengujian secara *pasif* dengan menunggu adanya permohonan dari para pihak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 51 undang-undang Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara *aktif*, yaitu tanpa menunggu adanya permohonan.

Namun, perlu diingat juga bahwa dalam pengujian secara aktif perlu diberikan batasan-batasan tentang undang-undang atau pasal undang-undang yang bagaimana bisa diuji secara aktif. Hal ini untuk mencegah menjelmana Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang otoritas tunggal penafsir konstitusi. Pencegahan ini perlu dilakukan mengingat tetap ada kemungkinan bahwa rasa keadilan yang hidup di masyarakat ternyata berbeda dengan keadilan yang



ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya telah berkembang tidak hanya melakukan *uji materiil* tetapi juga *uji formil* atas undang-undang memungkinkan untuk membatalkan banyak sekali undang-undang yang dibentuk tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme formil yang ada, tetapi sepanjang itu tidak merugikan rasa keadilan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya permohonan “Hak Menguji”, sebaiknya Mahkamah Konstitusi memilih untuk tidak menggunakan hak ini secara berlebihan.

Untuk itu maka Mahkamah Konstitusi dalam hal ini hanya bisa melakukan “Hak Menguji” secara aktif terhadap undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan langsung dengan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi apabila keberadaannya dianggap menghambat, merugikan atau merintangi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*.

Dengan adanya pemikiran alternatif semacam ini, penulis berharap bahwa perkembangan pemikiran tentang Mahkamah Konstitusi akan terus berkembang. Jika pemikiran ini ini bisa dianggap sebagai sebuah anomali, maka anomali ini justru akan memberikan rangsangan untuk terus dikembangkannya tradisi keilmuan atas Mahkamah Konstitusi. Pengembangan ini harus pula dengan dilandasi oleh sebuah kesadaran bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus diorientasikan pada upaya membina keselamatan dan kemajuan manusia, bukan merusaknya. Dan lebih utama lagi upaya pengembangan hukum ini harus dilandasai oleh nilai-nilai moral maupun religi.